EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG BAHARI DALAM MENDUKUNG KEGIATAN NEYALAN TAMBAKLOROK, SEMARANG.

Zihni Ihkamuddin
UNIMAR AMNI SEMARANG
email: z.ihkamuddin@gmail.com

Rian Arief Wibisono
UNIMAR AMNI SEMARANG
email: affandirian@gmail.com

ABSTRAK

Paradigma pesisir di masyarakat identik dengan kondisi prasejahtera, tak lepas di Tambaklorok yang dapat dilihat dari kondisi kekurangan gizi, pendapatan yang belum memadai, tingkat kesehatan, keterbatasan pendidikan, hunian yang tidak layak, pengelolaan sampah yang buruk, penurunan tanah, maupun ancaman dalam kondisi pembangunan infrastruktur dan tantangan sosial. Dalam rangka Indonesia sebagai poros maritim dunia, dicanangkanlah program Kampung Bahari untuk mengantisipasi serta menumbuhkan karakter bangsa maritim. Sebagai salah satu daerah percontohan, kawasan Tambaklorok yang terletak di pesisir Kota Semarang merupakan kawasan nelayan terbesar di kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis sinergi para stakeholder dalam pembangunan infrastruktur Kampung Bahari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memadukan teori keamanan maritim, teori sea power, teori sosiologi dan budaya maritim, teori sinergi, teori efektivitas dan konsep Poros Maritim Dunia dalam Soft System Methodology (SSM), serta Software NVivo untuk mengolah data dengan melakukan koding serta pembentukan kategori tema. Hasil dari penelitian ini ditemukan seiring berjalannya waktu jumlah nelayan berkurang disertai lunturnya jati diri bangsa maritim di kalangan pemuda, sinergi pembangunan kampung bahari hanya dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang, dan belum efektif kerja sama aspek pembangunan sosial antar sesama stakeholder terkait.

Kata kunci : *Tambaklorok, Kampung Bahari, Soft System Methodology, NVivo, Efektivitas, Kondisi Sosial dan Sosiologi Maritim*

PENDAHULUAN

Kondisi kemiskinan memiliki beragam wujud, menurut Dimitra & Yulisatuti (2012) kemiskinan dapat berupa pendapatan yang belum memadai, kekurangan gizi maupun kelaparan, tingkat kesehatan atau ketahanan terhadap penyakit, keterbatasan Pendidikan, tingkat kebersihan lingkungan maupun kondisi hunian yang tidak layak. Di Tambaklorok pendapatan per kapita tidak menentu setiap bulannya, berkisar Rp 450.000 hingga Rp 1.400.000, nilai tersebut masih di bawah UMR kota Semarang. Penelitian dari Wulaningrum, S.D. & Jayanti, T.B., (2016) menyatakan pendapatan nelayan tidak menentu, terkadang para nelayan mendapatkan omset Rp 500.000,00 namun pendapatan tersebut belum dipotong kebutuhan operasional maupun bahan bakar Rp 300.000,00 ataupun kebutuhan lain. Di tahun 2019, pendapatan nelayan semakin tidak menentu Arista (2019) menjelaskan pada musim kemarau nelayan hanya bisa mendapatkan Rp. 150.000,00 belum dipotong untuk biaya operasional Rp.100.000,00 jadi para nelayan tersebut hanya membawa sisa Rp. 50.000,00.

Guna mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia melalui proses upaya dan dukungan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang tersebut sesuai dengan gagasan Presiden Joko Widodo dalam membangkitkan jati diri bangsa maritim di Indonesia. Sebagaimana kutipan dari Irianti (2019) tentang visi dan misi dalam Poros Maritim Dunia (PMD), yang disampaikan dalam Pidato Presiden Jokowi di acara KTT saat IX *East Asia Summit* (EAS) pada bulan November 2014 di Myanmar menjelaskan bahwa Poros Maritim Dunia (PMD) memiliki lima (5) pilar yaitu (1) membangkitkan kembali budaya maritim Indonesia, (2) melindungi sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, (3) memprioritaskan pembangunan infrastruktur, (4) jalur penghubung maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, dan (5) pariwisata maritim.

Guna mendukung Poros Maritim Dunia (PMD), di bentuklah program pembangunan Kampung Bahari. Salah satu program pembangunan infrastruktur Kampung Bahari meliputi pembangunan Jalan utama dan Pasar Tambaklorok,

Semarang dengan anggaran Rp 47 Miliar. Pembangunan di Kawasan Tambaklorok sendiri dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dengan tujuan mengembangkan ekonomi perikanan yang berpedoman pada permukiman. Menurut hasil wawancara Setiawan, Novianti , & Suci, (2019) dengan Sekretaris Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang mengatakan bahwa harapan ke depan dari proses pembangunan ini adalah warga dapat melihat proses nelayan menangkap ikan, memproses hasil tangkapan laut, melihat rumah apung dan menikmati pemandangan laut di pesisir Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas pemerintah, institusi Pendidikan, Lembaga social masyarakat (LSM), Instansi Keamanan dan Perusahaan dalam pembangunan program Kampung Bahari di Tambaklorok Semarang. Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini pada aspek teoritis yaitu pengembangan keilmuan keamanan maritime dalam aspek pembangunan infrastruktur, manfaat dalam aspek praktis sebagai bahan masukan dan pemerintah bagi stakeholder daerah kota Semarang.

Pendahuluan disesuaikan dengan jenis penulisan, apakah penulisan berupa hasil penelitian atau penulisan merupakan kajian pustaka. Pendahuluan meliputi : 1) latar belakang permasalahan. Alasan penulis tertarik untuk meneliti atau menelaah permasalahan sehingga penting untuk dilaksanakan atau harus dikemukakan. 2) Review studi terdahulu. Menjelaskan penelitian-penelitian/teori-teori yang pernah dilaksanakan (penelitian terdahulu/teori terdahulu) yang terkait dengan fenomena/ penelitian saat ini, kemudian kemukakan posisi dan pembeda penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu. 3) Tujuan dan manfaat dari penelitian. Tidak ada sub bab dalam pendahuluan. Ditulis dalam bentuk tulisan Times New Roman size 10, diketik satu spasi. Kata dalam bahasa asing ditulis miring.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatori. Menurut Sugiyono, (2014) kualitatif ekplanatori sendiri merupakan sebuah penelitian yang

menjelaskan posisi – posisi variabel yang diteliti serta hubungan dengan variabel lainnya. Metode tersebut akan didukung dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, pengolahan data menggunakan *Software NVivo,* dan Analisa data menggunakan *Soft System Methodology* (SSM). Untuk memperdalam analisa, penggunaan metode *On Deep Interview* juga dilakukan pada saat penelitian di lapangan.

Dukungan Soft System Methodology (SSM) menjadikan penelitian ini bersifat lebih terstruktur dan memiliki Analisis yang tajam dalam menganalisis kepentingan – kepentingan dalam menganalisa kondisi masyarakat pesisir pada Program Kampung Bahari, menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para aktor – aktor (stakeholder) terkait dalam menjaga keamanan maritim dari perspektif sosiologi maritim.

Subjek penelitian dibagi menjadi 5 golongan, yaitu yaitu Pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat, Institusi Pendidikan (Pakar Maritim), Lembaga Keamanan dan Lembaga Sosial Masyarakat yang terkait dalam Program Kampung Bahari di Tambaklorok Semarang. Kemudian untuk Objek dari penelitian ini adalah Masyarakat Tambak Lorok.

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi; sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap dokumen, materi audio, visual, serta penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan Software NVivo yang dikembangan oleh *Qualitative Solution and Research (QSR) International* Sidik & Mulya (2011). NVivo merupakan alat bantu dalam proses pengolahan data dan sekaligus melakukan triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data, serta membantu dalam melakukan koding dari hasil penelitian di lapangan. Kemudian untuk Analisa data menggunakan Soft System Methodology (SSM) sesuai dengan Checkland (1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Bahari terletak di Kawasan Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kawasan dengan luas

wilayah +84,48 ha ini berkembang sebagai perkampungan nelayan terbesar di Kota Semarang sejak tahun 1950. Perkampungan nelayan Tambaklorok terletak di lokasi strategis ekonomi Kota Semarang, di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas yang termasuk dalam kawasan perekonomian penting bagi Kota Semarang.

Proses pembangunan Kampung Bahari disesuaikan dengan penyusunan RTBL Kawasan Tambaklorok Kota Semarang yang menjadikan dasar dalam pembangunan terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang terintegrasi dengan pembangunan Kota Semarang. Kawasan Tambaklorok merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Emas, dalam perencanaannya tidak terlepas dari bagian Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, tentang pengembangan pelabuhan utama (Pasal 23 Ayat (2) poin a) dan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi (Pasal 100 poin q) dalam penyusunan RTBL mempertimbangkan kaidah dan ketentuan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai Pelabuhan Utama pada Gambar 1.

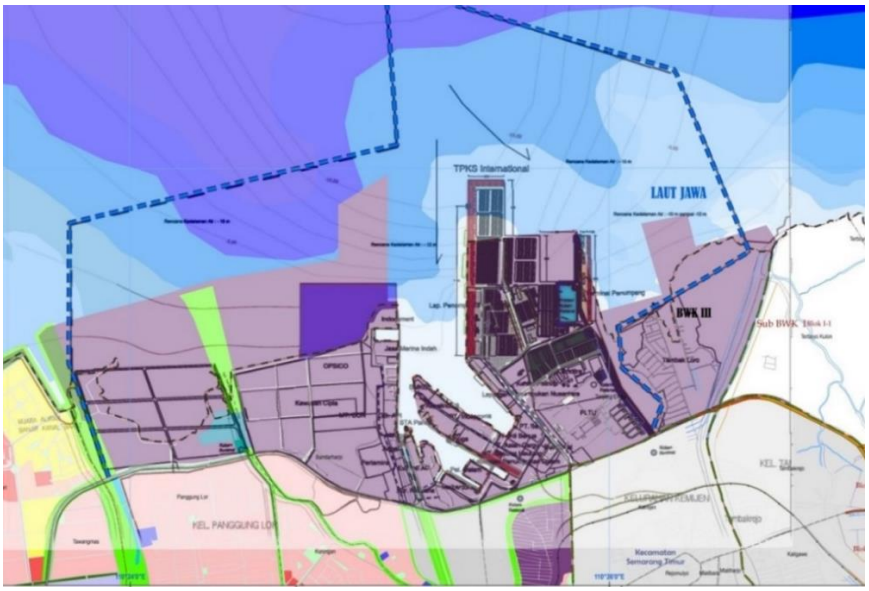

Gambar 1. Kawasan Perencanaan Pola Ruang Tambaklorok, Semarang
Sumber: (BAPPEDA, 2019)

Berdasarkan fungsi tersebut, peran kawasan Tambaklorok dalam ketetapan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Kawasan Tambaklorok diatur dalam zonasi ke ruangan

pelabuhan sebagai Kawasan Pelabuhan Rakyat meskipun lokasinya di luar *break water* kolam pelabuhan Gambar 2. Perkembangan di lapangan ketika nantinya *wall breakwater* telah selesai dibangun sepenuhnya, diperlukan akses jalur keluar masuk kapal nelayan agar tidak mengganggu aktivitas lainnya, ditambah lagi dengan lokasi area penangkapan ikan harus di luar akses kolam pelabuhan.

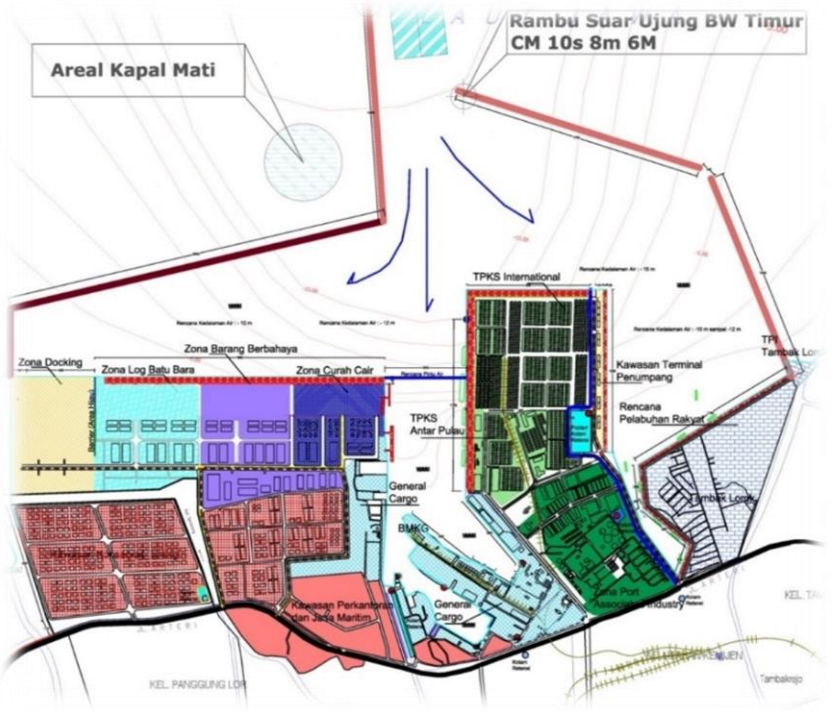

Gambar 2. Rencana Induk Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
Sumber: (BAPPEDA, 2019)

Proses pembangunan infrastruktur di pimpin oleh BAPPEDA Kota Semarang, pembangunan meliputi proses pembuatan RTBL, sosialisasi ke warga, hingga pelaksanaan di lapangan. Proses pembangunan yang telah berlangsung antara lain meliputi Pembuatan jalan dan drainase (2015), Rumah Apung (2016), pembangunan tanggul atau Sheet Pile U (2015-2017), Ruang Terbuka Hijau (2017-2019) dan Jalan Tambaklorok (2017-2019). Pendanaan itu sendiri dari APBN, yang kita tawarkan kepada kementerian – kementerian. Seperti pembangunan infrastruktur kepada Kementerian PUPR pada Direktorat Cipta Karya. Pembangunan Nelayan diajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan NVivo, data penelitian yang diperoleh diolah dalam aplikasi NVivo dengan membuat koding berdasarkan kategori-kategori agar membantu peneliti dalam penyusunan tema dan mengeksplorasi bagaimana hubungan antar atribut yang ditemukan di lapangan. Koding dibentuk berdasarkan pada pertanyaan – pertanyaan penelitian pada saat penelitian berlangsung, dan data sekunder. Klasifikasi tema yang dibuat dalam koding NVivo mengacu pada pertanyaan penelitian berdasar teori dan konsep yang diaplikasikan pada penelitian, sedangkan klasifikasi nodes dalam NVivo mengacu pada pedoman wawancara. Tahapan dalam proses pengolahan sendiri meliputi input data, proses koding, dan triangulasi data.

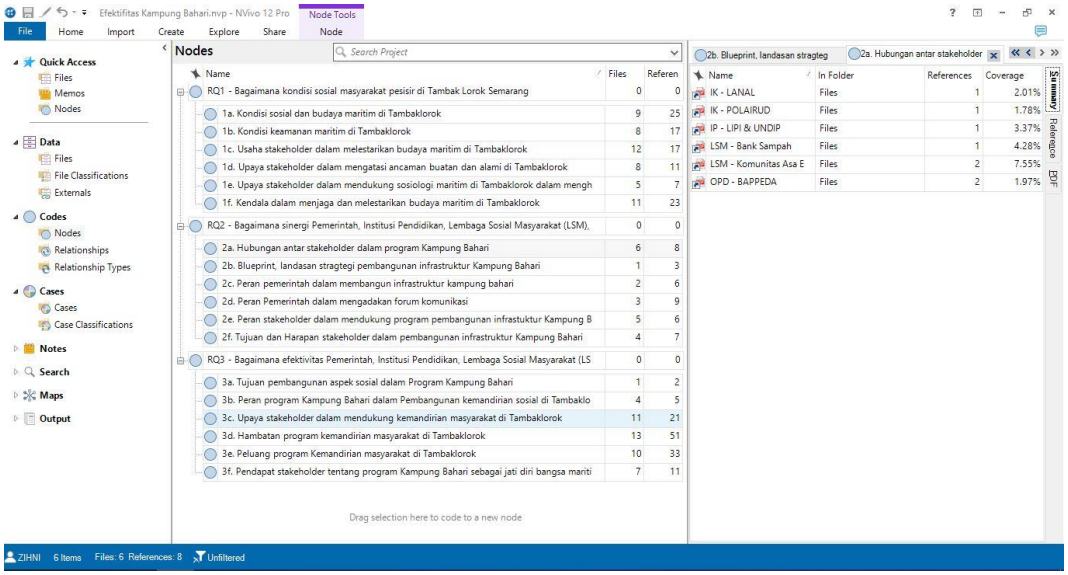

Gambar 3. Proses Triangulasi data
(Sumber : Data primer)

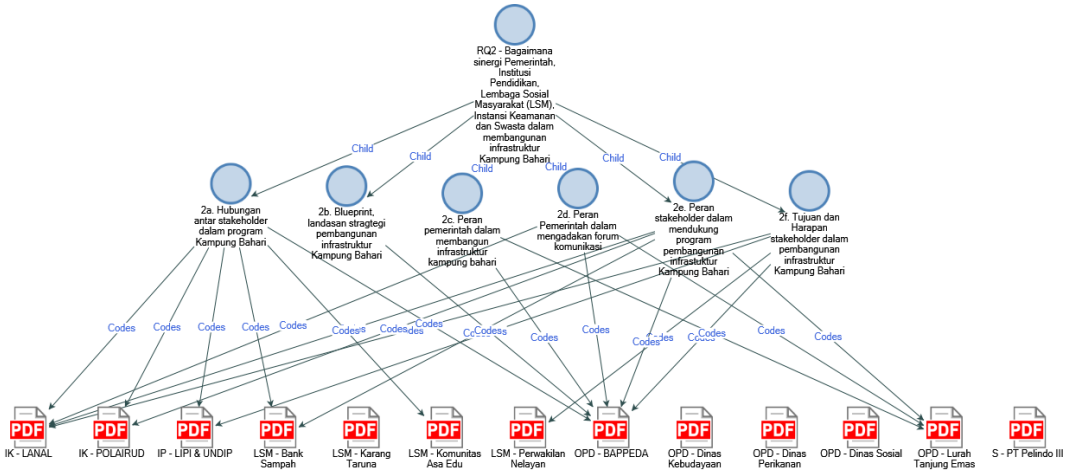

Gambar 4. Bagan triangulasi atas pertanyaan penelitian
(Sumber : Hasil olah data)

Analisis Soft System Methodology

Proses Analisa menggunakan SSM menurut Checkland (1991) menggunakan 7 tahapan yaitu: Examinations of the problem situation, Expressed the rich picture, root definition, conceptualization and modeling, comparison of models, guidelines, and design of action program.

Gap pertama yang ditemukan yaitu belum terlaksana pembangunan infrastruktur sesuai dengan RTBL Tambaklorok. Hal tersebut dapat peneliti amati dari proses pembangunan yang sudah mencapai tahap final namun dalam kondisi yang tidak meyakinkan, ataupun sudah terdapat dalam rancangan tapi belum terealisasi. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya sistem perawatan yang baik dari pemerintah maupun masyarakat, hal ini menunjukkan belum terjadinya sinergi antara Bappeda Kota Semarang selaku leading sector dan Masyarakat Tambaklorok. Padahal dua aktor ini termasuk dalam elemen yang terdapat dalam teori sea power guna mewujudkan kekuatan laut Indonesia.

Gap yang ditemukan lainnya yaitu belum adanya pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi infrastruktur maritim di Tambaklorok. Perawatan dan pengawasan pasca pembangunan masih dianggap selesai apabila bangunan atau dana proyek telah selesai. Hal tersebut membuat beberapa lingkungan infrastruktur terbengkalai atau tidak terrawat. Bila diteruskan hal ini dapat mengakibatkan kerusakan yang semakin parah dan akan berdampak terhadap

kegiatan ekonomi, sesuai pendapat Bowen & Riley, (2003) apabila infrastruktur kawasan dapat terjaga maka seluruh aktivitas isu prioritas lain akan tertopang begitu juga kegiatan ekonomi.

Gap ketiga, belum terlaksana koordinasi hasil pembangunan infrastruktur maritim kepada Kementerian PUPR. Dalam mencapai kesuksesan Pembangunan Kampung Bahari, walau dalam konteks nasional belum memiliki satu definisi yang solid mengenai apa dan bagaimana Kampung Bahari itu, namun kesepakatan bahwa inti dari Kampung Bahari menurut BAPPEDA (2019) adalah bagaimana menciptakan kondisi infrastruktur yang bebas dari ancaman dan mampu meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat nelayan. Secara keseluruhan program Kampung bahari dapat dilihat dari perspektif infrastruktur yang mendukung aktivitas di laut, proteksi keamanan batas wilayah maritim, tata kelola, hingga sistem transportasi dan aktivitas maritim.

KESIMPULAN

Sinergi antar *stakeholder* dalam pembangunan infrastruktur Kampung Bahari telah terlaksana dalam bentuk kolaborasi pembangunan. Bappeda Kota Semarang selaku pemimpin pembangunan infrastruktur berfokus terhadap pembangunan fisik bangunan, sedangkan *stakeholder* lain berfokus terhadap pengadaan sarana dan prasarana. Upaya sinergi ini masih dapat ditingkatkan dengan cara mengajak perusahaan swasta dan milik negara di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas untuk ikut serta dalam program Pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilakukan agar pembangunan Tambaklorok yang sesuai dengan RTBL dapat tercapai lebih baik daripada sebelumnya.

Aktivitas pengawasan pembangunan dan pemanfaatan yang belum optimal dapat ditingkatkan dengan melibatkan peran masyarakat. Posisi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan dapat diberikan tanggung jawab khusus guna mengawasi proses pembangunan tersebut dengan harapan muncul rasa memiliki agar ikut serta merawat infrastruktur yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Arista, B. (2019). *Musim Kemarau, Nelayan Semarang Susah Dapatkan Ikan*. Retrieved from gatra.com: https://www.gatra.com/detail/news/424590/economy/musimkemarau-nelayan-semarang-susah-dapatkan-ikan

BAPPEDA. (2019). *RTBL Kawasan Tambak Lorok Kota Semarang.* Semarang: BAPPEDA Kota Semarang.

Bowen, R., & Riley, C. (2003). Socio-Economic Indicators and Integrated. *Ocean & Coastal Management,* 299-312.

Checkland, P. (1991). *Soft System Methodology (SSM).* Denmark: University Alborg.

Dimitra, S., & Yulisatuti, N. (2012). Potensi Kampung Nelayan Sebagai Modal Pemukiman Berkelanjutan di Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas. *Jurnal Teknik PWK, 1*((1)), 16.

Setiawan, H., Novianti , F., & Suci, P. (2019, Februari 25). *Suara Merdeka*. Retrieved from Kampung Bahari Tambak Lorok Wajah Kota: https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/170291/kampungbahari-tambaklorok-wajah-kota-semarang

Sidik, A., & Mulya, B. W. (2011). Pendekatan Analisis Data Menggunakan NVivo-software untuk Penelitian Desain Logo Museum Nasional Jakarta. *Jurnal Desain Komunikasi, XIII*(1), 1-4.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen (3rd ed).* Bandung: Alfabeta.

Wulaningrum, S.D., & Jayanti, T.B. (2016). Evaluasi Kondisi Eksisting Kawasan Tambak Lorok untuk Penerapan Konsep Minapolitan. *Jurnal Pengambangan Kota*, 21-28.